



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ITA KUSUMAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 238588

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.350.050.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 452 m2/275 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1041 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/258 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 895.000.000
4. Tanah Seluas 747 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
5. Tanah Seluas 747 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 240.050.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1050 m2/60 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 313.000.000**

1. MOBIL, CHEVROLET SPIN MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XRIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. MOBIL, MITSUBISI PAJERO SPORT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.570.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	458.052.171
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.000.000
Sub Total	Rp.	5.746.602.171
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.746.602.171

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.